

EDISI
JAN. - FEB. 2026
TAHUN XVIII.



HADIRI PERINGATAN
HUT PPM
EVI YANDRI TEKANKAN
SEMANGAT PERJUANGAN
DAN NILAI KEBANGSAAN



DPRD SUMBAR PERTAJAM
FUNGSI PENGAWASAN
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025



MIMBAR

DPRD SUMATERA BARAT / ASPIRATIF - RESPONSIF - INOVATIF



OPTIMALISASI PAJAK AIR PERMUKAAN MAKSIMALKAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH



KETUA DPRD SUMBAR SERAHKAN
BANTUAN UNTUK MASJID
ALMUHAJIRIN NUANSA INDAH III



DPRD SUMBAR SIAP GESER ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH HARUS TETAPKAN
PRIORITAS PEMULIHAN PASCABENCANA



HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH
BAPEMPERDA DPRD SUMBAR RAPAT
DENGAN KANWIL KEMENKUM HAM

Pengantar Redaksi

Redaksi Majalah MIMBAR DPRD Provinsi Sumatera Barat mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan sekaligus Selamat Idulfitri 1447 H. Minal aidin walfaidzin, mohon maaf lahir dan batin.

Majalah MIMBAR hadir kembali dengan edisi pertama di tahun 2026, menyajikan berbagai informasi terkait kegiatan kedewanan yang dirasakan penting untuk diketahui masyarakat pembaca.

Kondisi keuangan daerah, terdampak kebijakan efisiensi anggaran sehingga pemerintah daerah harus mencari berbagai inovasi untuk mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan, salah satunya dari pajak air permukaan menjadi informasi yang dirasa menarik untuk disimak. Informasi ini Redaksi jadikan sebagai laporan Utama MIMBAR edisi kali ini, dengan harapan masyarakat mengetahui bagaimana upaya pemerintah daerah bersama DPRD dalam menggali sumber pendapatan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, memasuki tahun anggaran 2026, DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui komisi-komisi juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan program pembangunan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah daerah (OPD). Komisi-komisi sesuai bidang tugasnya melakukan rapat dengan OPD mitra kerja masing-masing untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2025. Tujuannya adalah sebagai langkah perbaikan sehingga ke depan bisa meningkatkan kinerja dalam melaksanakan program kegiatan yang telah disusun.

Selanjutnya, memanfaatkan momen bulan suci Ramadan 1447 H, seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat juga turun ke masyarakat, mendatangi masjid dan musala untuk bertatap muka dan menyampaikan pesan-pesan pembangunan. Dalam kesempatan itu, juga menyampaikan bantuan dari pemerintah provinsi untuk pembangunan rumah ibadah yang dikunjungi agar masjid dan musala semakin nyaman dan lengkap sarana prasarana. Momen tersebut juga dimanfaatkan untuk berdialog dan menampung aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan masuk ke dalam program pembangunan daerah.

Redaksi menyadari bahwa tidak seluruh kegiatan kedewanan dapat dimuat untuk disajikan karena keterbatasan ruang. Namun demikian, DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menyediakan akses informasi dalam jaringan pada website <https://dprd.sumbarprov.go.id/> yang bisa diakses di mana pun dan kapan pun melalui sarana komunikasi berbasis internet.

Selamat membaca!

Dahrul Idris, S.STP, M.Si
Pemimpin Redaksi



Susunan Redaksi
Mimbar DPRD Prov. Sumbar

Ketua:
Drs. H. Muhidi, MM

Wakil Ketua:
Evi Yandri Rajo Budiman, S.IP
Muhammad Iqra Chissa, S.ST. MM
Nanda Satria, S.IP

Penanggung Jawab:
Drs. Maifrizon, M. Si

Redaktur:
Dahrul Idris, S.STP

Penyunting/Editor:
Deny Suryani, S.IP

Fotografer:
Marjoni
Pendika Saputra

Sekretaris:
Arnelly Amran, S.Sos
Taharuddin
Supriyadi

Konsultan:
Padangmedia.com

Sekretariat Redaksi:
Humas DPRD
Provinsi Sumatera Barat
Jl. Khatib Sulaiman No. 87
Padang, Sumbar

Telp. (0751) 7057591 - 7057592 -
7057593

Fax: (0751) 7059328

Website:
<https://dprd.sumbarprov.go.id>



Sekapur Sirih

Drs. Maifrizon, M.Si

Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2025 telah berganti. Pada tahun 2026 ini, DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama sekretariat bertekad untuk terus meningkatkan kinerja berdasarkan tugas dan kewenangan. Tekad itu dimulai dengan evaluasi kinerja tahun 2025, sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD mengevaluasi bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Apakah telah sesuai dengan perencanaan dan target, dan apakah telah pula memperlihatkan manfaat untuk daerah dan masyarakat.

Evaluasi kinerja 2025 itu dilaksanakan komisi-komisi dan juga DPRD secara kelembagaan. Tujuannya untuk mencari solusi dan langkah agar pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2026 bisa lebih baik lagi.

Selain itu, salah satu hal penting yang dilaksanakan DPRD Sumatera Barat pada awal tahun 2026 ini adalah sosialisasi pajak air permukaan (PAP). Sosialisasi tersebut dilaksanakan DPRD Sumatera Barat bersama pemerintah provinsi. Sosialisasi dilaksanakan ke tujuh kabupaten kota. Pada awal April 2026 ke tujuh daerah tersebut akan selesai kegiatan sosialisasinya untuk kemudian dengan rencana agenda sosialisasi ke

perusahaan-perusahaan wajib pajak PAP sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022.

Sosialisasi PAP ini dilaksanakan DPRD Sumatera Barat sebagai upaya untuk menguatkan fiskal daerah ditengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Pemungutan PAP telah diterapkan di Sumatera Barat sejak tahun 2023 seiring dengan telah adanya regulasi yang menjadi payung hukumnya berupa peraturan daerah dan peraturan gubernur.

Namun setelah DPRD Sumatera Barat melakukan kajian bersama tenaga ahli dan juga pemerintah provinsi, diketahui bahwa pelaksanaan PAP yang telah dilakukan tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. PAP selama ini hanya dikenakan untuk PDAM dan PLTA.

Sementara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pajak air permukaan dipungut untuk semua pemanfaatan air permukaan yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung untuk usaha komersil dan industri.

Dengan sosialisasi PAP ini nantinya diharapkan pemungutan PAP bisa dilakukan dengan optimal sesuai dengan regulasi yang

ada. Tujuannya agar fiskal daerah tetap bisa menutupi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada awal tahun 2026 ini, DPRD Sumatera Barat juga telah melaksanakan sejumlah kegiatan dan program lainnya. Terutama yang menjadi agenda rutin tahunan. Seperti pelaksanaan kegiatan pertemuan dalam rangka masa reses. Seluruh pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Barat menjemput aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Aspirasi tersebut kemudian dicatat dan akan menjadi bahan pertimbangan untuk diwujudkan dalam program kegiatan pemerintah Sumatera Barat sesuai skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.

DPRD Sumatera Barat juga telah melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan daerah (sospes) pada awal tahun ini. Sama dengan kegiatan masa reses, sospes juga dilaksanakan pimpinan dan anggota dewan di dapil masing-masing. Dengan sosialisasi ini diharapkan tujuan pembentukan perda tercapai karena semakin banyak masyarakat memahaminya dan melaksanakannya dengan lebih optimal.

Drs. Maifrizon, M.Si

Sekretaris DPRD Sumatera Barat



Sambutan

Drs. H. MUHIDI, MM

Ketua DPRD
Provinsi Sumatera Barat

*Assalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh*

*Taqabballahu minkum, minna
wa minkum,*

Seluruh pimpinan dan anggota beserta jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mengucapkan Selamat Idulfitri 1447 H, Minal Aidin Walfaidzin, mohon maaf lahir dan batin.

Mengawali tahun 2026, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah ditunggu sejumlah agenda penting yang harus segera dituntaskan. Sebagai bentuk pengawasan yang menjadi tugas dan fungsinya, DPRD melalui komisi-komisi melakukan rapat dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) mitra kerja masing-masing untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan tahun 2025. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan menginventarisir masalah atau kendala yang dihadapi demi perbaikan pelaksanaan pembangunan di masa depan.

Menyikapi imbas dari kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat yang menyebabkan berkurangnya dana transfer ke daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengambil langkah-langkah strategis untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah melalui pengoptimalan potensi sumber pendapatan, salah satunya

adalah pajak air permukaan. Upaya keras DPRD dan Pemprov dalam menggali dan optimalisasi pendapatan asli daerah bisa dikatakan berhasil meningkatkan proyeksi pendapatan daerah pada APBD tahun 2026. Diharapkan proyeksi tersebut dapat direalisasikan oleh OPD terkait sehingga program dan kegiatan pembangunan yang telah disepakati di dalam APBD dapat berjalan secara maksimal.

Pada masa istirahat bersidang atau reses masa persidangan kedua tahun 2025/2026, seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat turun ke daerah pemilihan untuk bertatap muka dan menjangkau aspirasi masyarakat. Kunjungan di masa reses tersebut sangat krusial karena menjadi basis pembangunan daerah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang ditampung tersebut dihimpun di tingkat lembaga untuk diperjuangkan masuk ke dalam program pembangunan daerah.

Selain kunjungan reses, bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1447 H, seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan safari ke berbagai masjid dan musala di daerah pemilihan masing-masing. Dalam kesempatan itu, selain menyampaikan pesan-pesan pembangunan, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menyampaikan bantuan

untuk masjid dan musala yang dikunjungi untuk meningkatkan sarana fasilitas rumah ibadah tersebut sehingga meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam beribadah.

Menyikapi upaya pemulihan dampak bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2026 lalu, DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan perhatian besar terhadap rencana rehabilitasi dan rekonstruksi. DPRD berkomitmen mengawal upaya pemulihan agar berjalan secara cepat dan tepat sasaran, sehingga aktivitas masyarakat Kembali normal.

Ke depan, DPRD Provinsi Sumatera Barat akan terus meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah demi percepatan kemajuan daerah. Dukungan dari seluruh lapisan masyarakat melalui penyampaian masukan, saran, dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan demi terlaksananya tugas dan fungsi DPRD yang lebih efektif dalam mengawal program pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan untuk kesejahteraan masyarakat.

Billahi tauriq walhidayah
Wassalam

Drs. H. Muhidi, MM

Ketua DPRD Provinsi Sumatera
Barat



Optimalisasi Pajak Air Permukaan

Maksimalkan Potensi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu sumber utama pembiayaan program pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Total APBD Sumatera Barat tahun 2026 adalah sebesar Rp6,418 triliun, dengan komposisi belanja sebesar Rp6,42 triliun dan belanja daerah Rp6,2 triliun.

Dari proyeksi Rp6,2 triliun pendapatan daerah tersebut, sebesar Rp3,45 triliun diproyeksikan dari pendapatan asli daerah (PAD), sisanya sekitar



Rp2,7 triliun merupakan transfer ke daerah (TKD). Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi menyebutkan, pemerintah daerah bersama DPRD harus bekerja keras untuk meningkatkan PAD. Seluruh potensi daerah yang menjadi sumber PAD harus tergarap secara maksimal agar kebutuhan dana untuk program pembangunan dapat tercukupi.

Muhidi memaparkan, terjadinya pengurangan TKD akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat memberikan pengaruh cukup besar terhadap APBD. Pendapatan transfer yang

diterima tahun 2026 berkurang cukup besar.

Alokasi TKDD untuk Sumatera Barat di tahun 2026 hanya Rp2,751 triliun lebih, berkurang sekitar Rp664 miliar dari alokasi tahun 2025, dan juga

berkurang Rp429 miliar lebih dari rencana alokasi yang ditetapkan dalam KUA-PPAS 2026. Kondisi itu mengharuskan pemerintah daerah dan DPRD menyesuaikan Kembali arah kebijakan anggaran yang sudah disepakati dalam

KUA PPAS 2026.

"DPRD bersama pemerintah daerah harus bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan yang bersumber dari PAD agar pembangunan daerah tetap berjalan," katanya.

Penerimaan dari Pajak Air Permukaan Harus Dioptimalkan untuk Pacu PAD



Salah satu sumber pendapatan daerah yang dinilai cukup potensial untuk mendongkrak PAD adalah pajak air permukaan. Selama ini penggarapan potensi pajak tersebut dirasakan belum berjalan secara optimal, sementara potensinya cukup besar, terutama karena banyaknya perusahaan perkebunan yang beroperasi di Sumatera Barat.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman menerangkan, pemanfaatan air permukaan

merupakan salah satu objek yang dikenakan pajak berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Perda tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan kebijakan teknis melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2023 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan.

"Agar anggaran daerah mencukupi untuk membiayai program pembangunan setelah terimbas kebijakan efisiensi

harus ada inovasi dalam menggali berbagai potensi sumber pendapatan, salah satunya dari pajak air permukaan yang selama ini belum tergarap maksimal," kata Evi Yandri, Rabu (7/1/2026).

Evi Yandri menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus secara serius dan konsisten mengejar optimalisasi penerimaan Pajak Air Permukaan, khususnya dari perkebunan-perkebunan besar pemegang Hak Guna Usaha (HGU).

Landasan hukumnya

sudah sangat jelas, baik dalam peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun regulasi daerah. Tidak ada ruang abu-abu dalam kewajiban tersebut. Oleh karena itu, negara tidak boleh kalah dan pembiaran yang berlarut-larut.

Pajak Air Permukaan bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan bentuk keadilan ekologis. Air yang dimanfaatkan secara masif oleh perkebunan HGU adalah sumber daya publik yang memiliki nilai ekonomi dan lingkungan. Evi Yandri menyebutkan, potensi PAD dari pajak air permukaan diperkirakan bisa mencapai Rp577 miliar, angka yang cukup besar untuk menunjang pembangunan daerah.

"Ketika pemanfaatannya berkontribusi terhadap degradasi lingkungan dan memperbesar risiko bencana, maka sudah



sepatutnya ada kontribusi nyata bagi daerah," katanya.

DPRD memandang bahwa optimalisasi pajak ini dapat dan harus menjadi salah satu sumber pembiayaan strategis untuk pendanaan penanganan dan pemulihan kerusakan akibat bencana di Sumatera Barat. Masyarakat tidak boleh terus-menerus menanggung dampak bencana, sementara potensi penerimaan daerah yang sah justru tidak dimaksimalkan.

Untuk itu, DPRD mendorong pemerintah provinsi agar dilakukan penagihan yang tegas, serta penegakan aturan tanpa pandang bulu terhadap seluruh pemegang HGU. Ini adalah bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan, memperkuat keuangan daerah, dan memastikan keadilan bagi masyarakat Sumatera Barat.

DPRD dan Pemprov Gencarkan Sosialisasi Terkait Pajak Air Permukaan

Untuk meningkatkan pemahaman terhadap pajak air permukaan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan daerah, DPRD dan Pemprov Sumatera Barat menggencarkan sosialisasi ke sejumlah daerah, terutama yang memiliki perkebunan. Antara lain di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Pasaman, Pasaman Barat, Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Dharmasraya.

Sosialisasi itu dimaksudkan agar perusahaan perkebunan sebagai wajib pajak

mendapatkan pemahaman yang baik terkait kewajibannya membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pemanfaatan air tanah.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman dalam sosialisasi di Kabupaten Agam, Selasa (11/2/2026) menegaskan, pajak air permukaan merupakan salah satu potensi PAD yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah. Saat ini, kondisi fiskal daerah bisa dikatakan tidak baik-baik saja karena

adanya perubahan kebijakan pengurangan dana transfer pemerintah pusat ke daerah.

"Dalam kondisi itu, daerah harus bisa menggarap seluruh potensi PAD secara maksimal, termasuk pajak air permukaan, untuk menutupi kekurangan anggaran yang terjadi karena adanya perubahan kebijakan tersebut," tegasnya.

Selain itu, lanjutnya, Sumatera Barat saat ini membutuhkan anggaran besar untuk penanganan cepat rekonstruksi dan rehabilitasi dampak bencana. Penanganan



pascabencana harus berjalan secara maksimal agar dampak turunan yang ditimbulkan tidak semakin memperparah perekonomian daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemprov Sumatera Barat bersama DPRD harus mendalami berbagai potensi pendapatan untuk digarap secara maksimal agar kebutuhan anggaran pembangunan dapat terpenuhi.

"Salah satu sumber pendapatan yang memiliki potensi adalah pajak air permukaan, sehingga ini harus disosialisasikan agar bisa digarap lebih maksimal terutama kepada perusahaan-perusahaan perkebunan yang memiliki lahan sangat luas dengan potensi

pajak air permukaan yang cukup besar," ulasnya.

Dia menegaskan, seluruh pihak yang memanfaatkan air permukaan baik langsung atau tidak langsung dikenakan pajak, kecuali pemanfaatan air untuk rumah tangga, pertanian, dan perikanan. Regulasi itu menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menagih pihak-pihak termasuk perusahaan perkebunan dan sebagainya agar memenuhi kewajiban pajaknya.

"Setelah didalami, tidak hanya perusahaan air minum, pembangkit listrik tenaga air, restoran dan hotel yang memanfaatkan air permukaan, tetapi juga perusahaan perkebunan dan selama ini seperti luput dari perhatian," sambungnya.

Evi Yandri meminta kepada pihak perusahaan

pengguna air permukaan untuk mendalami undang-undang dan peraturan tentang pajak air permukaan. Untuk kemudian menindaklanjutinya dengan memenuhi kewajibannya menyeter pajaknya kepada pemerintah daerah.

Sosialisasi itu diharapkan wajib pajak memperoleh pemahaman yang utuh mengenai dasar hukum pajak air permukaan, objek dan subjek pajak, dasar perhitungan, tata cara pembayaran dan pelaporan, serta hak dan kewajiban wajib pajak.

Menurutnya, pajak air permukaan bukanlah sekadar pungutan, tetapi merupakan instrumen penting untuk menjaga kelestarian sumber daya air dan lingkungan, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang.*



Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat

Ketua Bapemperda DPRD Sumbang: Banyak Perda Belum Berjalan Maksimal

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhammad Yasin menegaskan, akan terus mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah yang telah diterbitkan. Dia mengungkapkan, masih banyak perda yang sudah dibuat namun belum terlaksana secara optimal, bahkan ada yang belum diterbitkan petunjuk teknisnya.

Hal itu diungkapkan Muhammad Yasin terkait inventarisasi produk hukum daerah yang dilakukan bersama Tim Ahli DPRD Sumatera Barat belum lama ini. Menurutnya, Bapemperda terus melakukan inventarisasi terhadap perda-perda tersebut termasuk relevansi produk hukum yang sudah ada dengan perkembangan terkini peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

"Bersama Tim Ahli DPRD kami terus menginventarisir dan mengevaluasi, bagaimana perda yang telah dibuat telah berjalan. Apakah berjalan secara maksimal, atau perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini dari perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," katanya.

Dia meminta, setiap perda yang telah diterbitkan untuk diikuti dengan aturan turunan dalam bentuk peraturan gubernur sebagai petunjuk pelaksanaannya. Perda diterbitkan untuk kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, sehingga harus bisa dilaksanakan secara maksimal.

"Kewenangan untuk membuat petunjuk teknis

pelaksanaan perda ini ada di pemerintah daerah melalui Biro Hukum. Bagi Perda yang belum ada Pergub, hendaknya segera diterbitkan agar bisa dilaksanakan," ulasnya.

Sementara itu, dia juga mengungkap ada perda yang dinilai perlu direvisi untuk penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, juga ada perda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pemerintahan daerah atau perda yang perlu digabung dengan perda lain karena adanya kesamaan materi dan muatan.

"Seluruh persoalan tersebut terus diinventarisir sehingga nantinya produk hukum yang ada bisa diaplikasikan secara maksimal, untuk tujuan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah," tutupnya. P

Ali Muda:

Perda Ketenagakerjaan Untuk Jaga Keseimbangan Kepentingan Pekerja dan Perusahaan



Anggota DPRD Sumatera Barat Ali Muda saat sosialisasi Perda Nomor 7 tahun 2019 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasaman Barat beberapa waktu lalu. (Dok. DPRD SB)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Ali Muda menegaskan, kepentingan pekerja dan kepentingan perusahaan pemberi kerja harus berjalan secara seimbang. Hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan pemberi kerja harus terlaksana secara adil, jangan merugikan salah satu pihak.

Hal itu ditegaskan Ali Muda terkait implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Ketenagakerjaan, belum lama ini. Menurutnya, terlaksananya hak dan kewajiban secara adil dan seimbang antara pekerja dan perusahaan akan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan nyaman sehingga iklim usaha berbending sejajar

dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Sumatera Barat memiliki Perda tentang Ketenagakerjaan sebagai tindak lanjut dari undang-undang untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dan perusahaan dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing agar seimbang untuk menciptakan iklim usaha yang sehat," kata Ali Muda.

Dia menambahkan, sebagai turunan dari peraturan perundang-undangan, Perda Ketenagakerjaan secara spesifik memuat aturan yang mengedepankan kearifan local. Salah satunya adalah terkait penyerapan tenaga kerja, hendaknya perusahaan memberikan prioritas kepada

tenaga kerja dalam daerah.

Ali Muda menyebutkan, banyak perusahaan terutama di sektor perkebunan yang beroperasi di Sumatera Barat, seperti di Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Dharmasraya dan lainnya.

"Keberadaan berbagai perusahaan tersebut tentunya membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja. Perda ini memberikan penguatan untuk hal itu, sepanjang tenaga kerja tersebut memenuhi persyaratan sesuai yang dibutuhkan perusahaan," ujarnya.

Dia menegaskan, peraturan daerah dilahirkan terutama untuk kesejahteraan masyarakat termasuk memberikan rasa aman kepada iklim usaha dan investasi. Jumlah pencari kerja di Sumatera Barat sangat tinggi seiring pertumbuhan penduduk, namun daya tampung lapangan kerja dalam daerah masih belum mencukupi.

Perda Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja, sekaligus meningkatkan rasa aman dan kepercayaan dari pihak perusahaan. Diharapkan, Perda tersebut bisa terlaksana dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan produktif untuk kemajuan daerah.

Nanda Satria: Koperasi dan UMKM Harus Terus Didorong untuk Tangguh dan Mandiri

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Provinsi Sumatera Barat Nanda Satria menegaskan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mampu menjadi penopang perekonomian masyarakat. Meski demikian, pembinaan dan perlindungan terhadap koperasi dan UMKM harus terus dilakukan agar terus berkembang dan maju sehingga memiliki daya saing yang kuat di pasar regional maupun internasional.

Nanda mengatakan, Provinsi Sumatera Barat telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sekaligus menjadi dasar hukum terhadap upaya-upaya pembinaan koperasi dan UMKM. Perda Nomor 16 tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM tersebut diharapkan menguatkan peran pemerintah daerah dalam pembinaan koperasi dan usaha kecil agar berkembang dan berdaya saing.

"Koperasi dan UMKM harus terus dibina agar bisa berkembang dan berdaya saing, pemerintah daerah telah memiliki perda yang bisa dijadikan dasar untuk meningkatkan upaya pembinaan usaha kecil milik masyarakat tersebut," kata Nanda, Rabu (7/1/2026).

Nanda menerangkan, Perda Nomor 16 tahun 2019 tersebut antara lain memuat tentang pemberdayaan dan perlindungan terhadap koperasi dan usaha kecil, pengembangan usaha



kecil, partisipasi masyarakat, pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan.

"DPRD telah melakukan sosialisasi perda ini dengan tujuan agar pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah yang menunjang perkembangan usaha mereka, menjadi pendorong terciptanya program dan inovasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pembinaan dan perlindungan kepada pelaku usaha kecil tersebut," tegasnya.

Terkait pembinaan koperasi dan UMKM, Nanda menyampaikan, dia telah mengalokasikan pokok-pokok pikirannya kepada beberapa kegiatan untuk mendukung

usaha kecil dan koperasi tersebut. Usulan terhadap program pembinaan koperasi dan UMKM tersebut telah masuk ke dalam APBD tahun 2026.

Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil ditetapkan pada 23 Desember 2019. Perda tersebut memberikan perlindungan bagi koperasi dan usaha kecil agar mampu tumbuh dan mandiri, termasuk pembatasan ritel modern dari luar daerah. Tujuannya adalah agar koperasi dan usaha kecil tersebut tangguh, berdaya saing, dan mandiri sebagai pilar ekonomi daerah.



Hadiri Peringatan HUT PPM

Evi Yandri Tekankan Semangat Perjuangan dan Nilai Kebangsaan

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman mengingatkan seluruh anggota Pemuda Panca Marga (PPM) untuk terus menanamkan semangat perjuangan untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan.

Hal itu ditegaskan Evi Yandri saat menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-45 PPM di Padang, Sabtu (31/1/2026). Dia menekankan, PPM mempunyai tanggung jawab moral untuk terus menjaga nilai kebangsaan melalui semangat perjuangan yang telah diwariskan dari para pejuang pendiri bangsa.

"PPM itu lahir dari veteran pejuang, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga nilai kebangsaan melalui semangat juang terhadap kemajuan bangsa," tegasnya.

Politisi Gerindra yang juga Ketua DPW PPM Sumatera Barat itu menambahkan, Sumatera Barat merupakan daerah tempat lahirnya pejuang dan banyak tokoh bangsa. Bahkan, pada saat terjadinya kekosongan pemerintahan di masa perjuangan kemerdekaan, pemerintahan darurat dibentuk di Sumatera Barat agar Indonesia tetap ada di mata dunia.

"Perjuangan para tokoh

bangsa untuk menjaga nilai kebangsaan itu harus terus hidup demi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Evi Yandri yang baru diamanahkan menjadi Ketua DPW PPM Sumatera Barat berpesan kepada seluruh anggota PPM agar menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan berbagai organisasi lainnya. Dia menyampaikan, ke depan sejumlah rencana program kerja sudah disusun untuk peningkatan kapasitas kader PPM dan program sosial untuk masyarakat. P

Hari Pers Nasional 2026

Muhidi: Pers Mitra Strategis Pemerintah Wujudkan Indonesia Emas

Insan pers diharapkan meningkatkan peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pers merupakan mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi, menyambut peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2026. HPN setiap tahun diperingati pada tanggal 9 Februari.

"Pers merupakan mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, kami berharap insan pers dapat meningkatkan peran dalam mengedukasi masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Muhidi.

Muhidi mengatakan, menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan perencanaan yang matang dan kerja sama seluruh elemen bangsa, termasuk pers. Target Utama dari tujuan tersebut adalah sumber daya manusia berkualitas.

"Sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas ini menjadi pilar pembangunan bangsa ke depan," tegasnya.

Dia melanjutkan, pers yang berintegritas dan bertanggung jawab akan menjadi sarana yang sangat strategis untuk mengedukasi masyarakat. Melalui penyampaian informasi yang tepat dan faktual, pers akan membentuk pola pikir



masyarakat yang konstruktif untuk membangun bangsa berkualitas.

"Kekuatan pers yang konsisten dalam membentuk pola pikir masyarakat akan menjadi salah satu penopang tercapainya tujuan Indonesia emas 2045," ulasnya.

Untuk itu, Muhidi juga berpesan kepada seluruh insan pers untuk tetap menjaga profesionalisme, berjalan dalam koridor kaidah jurnalistik, serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Perkembangan teknologi informasi yang pesat menjadi tantangan besar bagi

insan pers untuk tetap menjadi penyeimbang sehingga produk-produk jurnalistik tetap menjadi informasi yang kredibel dan dipercaya masyarakat.

Melalui momentum HPN 2026, Muhidi menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers yang telah memberikan kontribusi besar dalam mengawal jalannya pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan menyuarakan kepentingan masyarakat. Dia berharap pers Indonesia tetap konsisten menjadi pilar keempat demokrasi bangsa. P

Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri:

Peristiwa Situjuah Salah Satu Bukti Peran Sumbar dalam Perjuangan NKRI



Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman mengingatkan agar generasi bangsa tidak melupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawan dan perjuangan yang dilakukan untuk kedaulatan.

Hal itu ditegaskan Evi Yandri saat menghadiri peringatan ke-77 tahun Peristiwa Situjuah di Lapangan Khatib Sulaiman Nagari Situjuah Batua Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota, Kamis (15/1/2026). Dia menegaskan, Peristiwa Situjuah merupakan bagian dari sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) untuk menyelamatkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Peristiwa Situjuah ini merupakan salah satu bukti tentang peran pejuang Sumatera Barat dalam menyelamatkan kedaulatan NKRI. Peristiwa ini memiliki makna yang mendalam, bukan sekadar mengenang aksi heroik semata," tegasnya.

Dia memaparkan, melalui Peristiwa Situjuah banyak pelajaran yang bisa diambil dan hikmah yang bisa dipetik. Bahwa, perjuangan membutuhkan kekompakan dan persatuan, juga mengajarkan untuk selalu mewaspadaai Tindakan pengkhianatan.

"Meletusnya Peristiwa Situjuah berawal dari pengkhianatan, akibatnya ratusan pejuang gugur dalam peristiwa itu. Ini mengajarkan kita bahwa keberhasilan hanya bisa dicapai dengan kebersamaan dan menjaga persatuan sementara pengkhianatan

adalah Tindakan hina yang harus diwaspadai," katanya.

Dia berharap, nilai-nilai dan pelajaran berharga yang diperoleh dari Peristiwa Situjuah dapat menjadi pemacu semangat perjuangan demi kemajuan bangsa. Selain itu juga diharapkan semakin memperkokoh rasa nasionalisme, persatuan, dan kesatuan NKRI.

Lebih jauh Evi Yandri memaparkan, Peristiwa Situjuah merupakan pilar sejarah yang tidak terpisahkan dari keberadaan PDRI yang menjadi penyelamat kedaulatan NKRI di era perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Hal itu membuktikan bahwa peran tokoh-tokoh Sumatera Barat sangat penting mengambil keputusan strategis di saat-saat genting melawan agresi militer Belanda. T

Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbar Akan Kunjungi 216 Lokasi Selama Safari Ramadan



Selama bulan puasa Ramadan 1447 H, pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat akan mengunjungi total 216 rumah ibadah masjid dan musala dalam kegiatan safari Ramadan. Dalam kegiatan itu, akan disalurkan juga bantuan untuk rumah ibadah yang dikunjungi yaitu Rp50 juta untuk masjid dan Rp20 juta untuk musala.

Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Maifrizon menjelaskan, seluruh pimpinan dan anggota Dewan akan melakukan kegiatan tersebut di daerah pemilihan masing-masing.

"Kegiatan safari Ramadan pimpinan dan anggota DPRD ini merupakan bagian dari upaya

mempererat silaturahmi dengan masyarakat sekaligus untuk menjemput langsung berbagai aspirasi serta menyampaikan pesan-pesan pembangunan daerah," kata Maifrizon, Jumat (20/2/2026).

Dia menjelaskan, 65 anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat akan melakukan safari ke daerah pemilihan masing-masing yang terbagi dalam delapan daerah pemilihan. Dalam safari Ramadan tersebut, pimpinan dan anggota dewan akan didampingi juga oleh pimpinan OPD di Pemprov Sumatera Barat, pimpinan instansi vertikal, lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Maifrizon menjelaskan, dari total 216 lokasi yang akan dikunjungi dalam safari Ramadan tersebut, 25 lokasi akan dikunjungi oleh empat pimpinan

DPRD. Sementara 23 lokasi akan dikunjungi oleh sembilan orang anggota komisi I, 35 lokasi dikunjungi oleh 12 orang anggota Komisi II. Kemudian Komisi III yang berjumlah 12 orang akan mengunjungi 47 lokasi, Komisi IV dengan anggota 14 orang akan mengunjungi 51 lokasi serta Komisi V dengan anggota 15 orang akan berkunjung ke 45 lokasi.

Dalam melaksanakan safari Ramadan, Maifrizon menjelaskan, seluruh pimpinan dan anggota DPRD akan didampingi oleh staf sekretariat DPRD untuk memastikan kegiatan berjalan lancar. Mereka juga bertugas untuk mendokumentasikan dan mencatat berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang dimiliki. P

DPRD Sumbar Pertajam Fungsi Pengawasan

Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun 2025



Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mempertajam fungsi pengawasannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan organisasi pemerintah daerah (OPD). Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program pembangunan telah berjalan, permasalahan atau kendala yang dihadapi, serta efektivitas dan efisiensi anggaran yang dialokasikan.

Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi menegaskan, pelaksanaan rapat evaluasi komisi-komisi dengan OPD mitra kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas

dan fungsi DPRD di bidang pengawasan.

"Dengan adanya evaluasi ini, akan diketahui sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah, apa kendala yang dihadapi, dan sebagainya sehingga bisa mengambil langkah-langkah strategis dalam perencanaan kerja dan anggaran di tahun berikutnya," kata Muhidi Rabu (7/1/2026).

Melalui rangkaian rapat dengan OPD mitra kerja tersebut, DPRD mendorong sejumlah agenda strategis, mulai dari peningkatan akurasi penganggaran program kerja, komitmen penyelamatan hutan, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan dividen, hingga percepatan pemulihan

pascabencana banjir dan longsor.

Komisi I yang membidangi Pemerintahan menggelar rapat kerja evaluasi capaian kinerja OPD mitra tahun anggaran 2025, menekankan pentingnya peningkatan akurasi perencanaan anggaran agar serapan belanja daerah lebih optimal serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dapat ditekankan.

Ketua Komisi I DPRD Sumatera Barat, Sawal mengatakan, evaluasi dilakukan untuk mengkaji secara menyeluruh capaian serta kendala yang dihadapi OPD selama 2025, sekaligus menjadi dasar penyusunan program tahun 2026.

"Evaluasi ini bertujuan memastikan seluruh program

berjalan tepat sasaran. Kami juga mendorong persiapan yang lebih matang agar pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 bisa berjalan efektif sejak awal tahun,” kata Sawal.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Sumbang, Irsyad Syafar, menyebutkan secara umum kinerja OPD mitra Komisi I menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan capaian program di atas 90 persen.

“Sebagian besar target dan program kerja berhasil dituntaskan. Namun, masih terdapat kegiatan yang telah tercapai secara fisik 100 persen, tetapi serapan anggarannya belum maksimal,” ujarnya.

Menurut Irsyad, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar ke depan perencanaan anggaran lebih presisi, sehingga SiLPA dapat ditekan dan dialokasikan untuk program prioritas lainnya.

Komisi II DPRD Sumatera Barat mendorong pemerintah provinsi untuk menjalankan program kerja 2026 yang berorientasi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketua Komisi II Khairudin Simanjuntak menegaskan, program pembangunan harus berdampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Ia menambahkan, Komisi II siap mendukung program-program tersebut dengan catatan koordinasi antara OPD dan DPRD terus diperkuat agar pelaksanaannya berjalan optimal. Rapat dengar pendapat bersama OPD mitra kerja juga mengungkap praktik ilegal logging yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat. Hal itu menjadi wadah koordinasi untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan efektivitas kebijakan di sektor kehutanan.

Dalam rapat tersebut, Komisi II menekankan pentingnya kolaborasi dan komitmen



bersama selaku pemangku kepentingan guna menjaga kelestarian hutan sebagai aset strategis daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan demi masa depan Sumatera Barat yang lebih baik.

Komisi III DPRD Sumatera Barat menekankan pentingnya peningkatan dividen dari BUMD serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komisi yang membidangi keuangan daerah itu mendorong mitra kerja meningkatkan kinerja dan profesionalisme pengelolaan keuangan. Rapat evaluasi tersebut ditegaskan bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan forum strategis untuk menelaah capaian kinerja OPD, mengidentifikasi tantangan di lapangan, serta menyusun langkah perbaikan agar perencanaan 2026 lebih efektif dan tepat sasaran.

Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen mengawal pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah di Sumbang. Ketua Komisi IV Doni Harsiva Yandra mengatakan, pemulihan infrastruktur dasar menjadi perhatian utama karena banyak fasilitas publik mengalami kerusakan.

“Banyak jalan dan jembatan yang rusak sehingga mengganggu mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Ini membutuhkan penanganan cepat dan perencanaan anggaran yang

tepat,” ujarnya.

Ia menegaskan, Komisi IV akan memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan terukur, tepat sasaran, serta sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat juga terus didorong.

Selain itu komisi IV juga melaksanakan serangkaian rapat membahas regulasi jasa konstruksi sekaitan dengan pembahasan ranperda. Rapat dilakukan bersama organisasi perangkat daerah (OPD). Pembahasan itu diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat regulasi jasa konstruksi agar lebih profesional, berkualitas serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Komisi V DPRD Sumatera Barat memperkuat komitmennya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui evaluasi dan perencanaan program kesejahteraan rakyat. Ketua Komisi V Lazuardi Erman mengatakan, rapat kerja bersama OPD mitra difokuskan pada upaya memastikan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial berjalan optimal dan berkelanjutan.

Melalui rangkaian evaluasi ini, DPRD Sumbang berharap perencanaan program dan penganggaran Tahun 2026 dapat lebih berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.

T



Ketua DPRD Sumbar Kunjungi Warga Kuranji Dengarkan Keluhan Pascabencana

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi mengunjungi masyarakat Guo Kelurahan Kuranji Kota Padang, Jumat (6/2/2026). Kunjungan memanfaatkan masa istirahat bersidang (reses) tersebut untuk mendengarkan langsung keluhan warga yang terdampak bencana galodo beberapa waktu lalu.

Muhidi menyampaikan, kunjungan di masa reses merupakan kesempatan penting bagi anggota DPRD untuk melihat langsung kondisi masyarakat di daerah pemilihan. Aspirasi yang ditampung akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan DPRD dan pemerintah provinsi untuk dimasukkan kedalam program pembangunan melalui APBD

provinsi.

"Seluruh aspirasi yang disampaikan akan kami tampung untuk ditindaklanjuti sesuai porsi kewenangannya," kata Muhidi.

Dalam kesempatan itu Muhidi menyampaikan juga bahwa salah satu aspirasi masyarakat yaitu pembangunan musala dapat diperjuangkan melalui bantuan APBD provinsi sebesar Rp20 juta. Dia meminta warga melengkapi persyaratan berkaitan antara lain surat keterangan dari kelurahan, rekomendasi dari Pemko Padang, surat keputusan pengangkatan pengurus dari KUA, dan proposal kepada pemerintah provinsi.

Terkait penanganan masyarakat terdampak bencana, Muhidi menyampaikan bahwa seluruh data telah diinput dalam

sistem R3P sesuai kebijakan pemerintah pusat. Pihaknya mendorong agar bantuan segera dapat direalisasikan sebelum bulan puasa. Menurutnya, bencana galodo yang terjadi tidak hanya menimbulkan kerusakan infrastruktur, tetapi juga melumpuhkan perekonomian masyarakat. Untuk itu dibutuhkan program yang melibatkan masyarakat aktivitas perekonomian Kembali bergerak.

Beberapa hal lainnya yang menjadi aspirasi masyarakat dalam pertemuan itu antara lain mengenai perbaikan jaringan irigasi yang jebol akibat bencana. Selain itu mengenai penanganan penyakit masyarakat, serta usulan bantuan untuk kelompok usaha bersama dan pelaku UMKM. F

Evi Yandri Apresiasi Kepedulian Raffi Ahmad dan Tompi untuk Korban Bencana Sumbar



Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri menyampaikan apresiasi atas kepedulian Raffi Ahmad dari RANS Entertainment, Tompi, dan 100 musisi heal Sumatera, serta alumni Universitas Indonesia terhadap korban bencana di Sumatera Barat.

Apresiasi itu disampaikan Evi Yandri saat mendampingi para musisi dan pesohor tersebut menyerahkan bantuan untuk korban bencana banjir di Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (30/1/2026).

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat yang

menjadi korban bencana banjir, kami berharap bantuan dimanfaatkan dengan baik dan menjadi berkah bagi semuanya," kata Evi Yandri.

Raffi Ahmad yang juga merupakan staf khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni itu hadir Bersama Tompi dan Irma Hutabarat. Turut hadir dalam penyerahan bantuan itu antara lain Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy dan Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis.

Bantuan yang diberikan adalah berbagai peralatan rumah tangga, kebutuhan pokok, dan penyaring air bersih dan lainnya. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan di lokasi

hunian sementara Ketaping, didistribusikan untuk korban terdampak bencana di seluruh Sumatera Barat.

Saat penyerahan bantuan, Raffi Ahmad mengharapkan bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan beban korban bencana. Sekaligus dilakukan penyerahan secara simbolis kunci rumah huntera yang dibangun Danantara untuk segera ditempati oleh korban bencana di daerah itu.

Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih dan mengatakan bantuan memang diperlukan warga. Dia mengungkapkan, akibat bencana, Padang Pariaman seperti mundur 20 tahun. P

Jemput Aspirasi Masyarakat di Masa Reses

Irsyad Syafar Kunjungi SLB Negeri 1 Harau dan Beberapa Kelurahan di Kota Payakumbuh



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Irsyad Syafar mengunjungi Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 1 Harau Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa (3/2/2026). Kunjungan itu dilakukan memanfaatkan masa istirahat bersidang (reses) masa persidangan kedua 2025/2026 dengan tujuan menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.

Dalam kunjungan itu, Irsyad Syafar diterima oleh Kepala SLB Negeri 1 Harau Herman Gafur bersama Ketua Komite Sekolah dan jajaran guru-guru di sekolah tersebut. Pada kesempatan itu, pihak sekolah menyampaikan sejumlah aspirasi penting yang diharapkan dapat diperjuangkan melalui DPRD Provinsi Sumatera

Barat.

Aspirasi utama yang disampaikan yakni permohonan bantuan kendaraan operasional sekolah guna menunjang aktivitas pendidikan dan pelayanan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, juga berharap bantuan pembangunan pagar sekolah sepanjang kurang lebih 83 meter, demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan belajar.

Menjawab aspirasi tersebut, Irsyad Syafar menegaskan komitmennya dalam mendukung sektor pendidikan termasuk Pendidikan luar biasa. Menurut Irsyad, SLB memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang tentunya sangat membutuhkan sarana

prasarana yang memadai.

Menurut Irsyad, SLB membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah karena merupakan Lembaga pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk itu, dia berkomitmen akan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan sesuai mekanisme dan kewenangan yang dimiliki agar harapan tersebut dapat terwujud di dalam program kegiatan APBD provinsi.

Pada reses masa persidangan kedua tahun 2025/2026, selain mengunjungi SLB Negeri 1 Harau, Irsyad Syafar juga menjemput aspirasi masyarakat di beberapa lokasi di Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh yang menjadi daerah pemilihannya. Kunjungan menjemput aspirasi antara lain dilaksanakan di Kelurahan Tiakar Hilir Kecamatan Payakumbuh Timur dan di Kelurahan Bulakan Balai Kandih Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Senin (2/2/2026).

Irsyad menegaskan, sebagai perwakilan dari masyarakat di daerah pemilihan, seluruh aspirasi yang disampaikan akan diperjuangkan masuk ke dalam program pembangunan daerah yang didanai APBD provinsi. Hal itu sebagai bentuk tanggung jawab anggota dewan kepada masyarakat di daerah pemilihan. P

Evi Yandri: Pembangunan Huntara Mandiri di Kapalo Koto Hampir Rampung



Pembangunan hunian sementara (Huntara) Mandiri warga terdampak banjir bandang di Kapalo Koto Kecamatan Pauh Kota Padang mencapai 90 persen. Sebanyak 50 unit sudah mulai ditempati sementara 50 unit lainnya diperkirakan selesai pekan depan.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman saat meninjau pelaksanaan pembangunan Huntara tersebut bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Rabu (21/1/2026).

"Hingga saat ini kemajuan pembangunan sudah 90 persen, dari 100 unit saat ini

50 unit sudah mulai ditempati sedangkan 50 unit lainnya diperkirakan drampung pekan depan," katanya.

Evi Yandri yang juga bertindak sebagai penanggung jawab dalam program tersebut menerangkan, pembangunan Huntara Mandiri di Kapalo Koto Kecamatan Pauh tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara DPRD dan pemerintah provinsi serta didukung oleh pemerintah pusat.

Huntara Mandiri di Kapalo Koto Kecamatan Pauh tersebut menurut Evi Yandri juga dilengkapi dengan peralatan rumah tangga seperti perlengkapan dapur dan tempat tidur. Selain itu juga dilengkapi dengan air bersih dan fasilitas

sanitasi yang dibangun terpisah.

Menurutnya, percepatan pembangunan Huntara Mandiri tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD dan pemerintah terhadap pemulihan pascabencana bagi masyarakat. Dia menegaskan, percepatan pembangunan dilakukan agar korban banjir bandang dapat kembali beraktivitas secara normal, tidak lagi tinggal di pengungsian.

"Apalagi tidak berapa lama lagi akan memasuki bulan puasa, kita berharap pembangunan hunian ini segera bisa ditempati seluruhnya agar korban bencana dapat menjalankan ibadah dengan tenang serta menjalankan aktivitas secara normal," tandasnya. F

Ketua DPRD Sumbar Serahkan Bantuan untuk Masjid Almuhajirin Nuansa Indah III



Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi menyerahkan bantuan sebesar Rp50 juta untuk Masjid Almuhajirin Perumahan Nuansa Indah III Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Kamis (15/1/2026).

Bantuan diserahkan Muhidi pada kesempatan memberi tausiah di masjid tersebut dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1447 H, diterima oleh Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin, Feriza Putra.

Dalam kesempatan itu, Muhidi mendorong orang tua untuk mengajak anak-anaknya membiasakan diri datang ke masjid, baik untuk melaksanakan ibadah maupun untuk kegiatan keagamaan lainnya. Dia meminta pengurus masjid dan pengurus Taman Pendidikan Alquran (TPA) untuk tetap aktif melaksanakan proses pendidikan dalam rangka menanamkan nilai-nilai agama kepada generasi bangsa untuk bekal hidup di masa depan.

"Nilai-nilai agama harus ditanamkan sejak dini, orang tua

harus mengajak anak-anak untuk membiasakan diri datang ke masjid, demikian juga pengurus masjid dan TPA harus terus aktif melaksanakan proses pendidikan demi menciptakan generasi yang berakhlak mulia," kata Muhidi.

Mewakili jamaah dan seluruh masyarakat, Ketua Pengurus Masjid Al Muhajirin, Feriza Putra menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ketua DPRD Sumatera Barat. Bantuan yang diberikan akan digunakan membiayai lanjutan pembangunan masjid yang masih membutuhkan dana. F

Evi Yandri: Peristiwa Situjuah Salah Satu Bukti Peran Sumbar dalam Perjuangan NKRI



Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman mengingatkan agar generasi bangsa tidak melupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawan dan perjuangan yang dilakukan untuk kedaulatan.

Hal itu ditegaskan Evi Yandri saat menghadiri peringatan ke-77 tahun Peristiwa Situjuah di Lapangan Khatib Sulaiman Nagari Situjuah Batua Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota, Kamis (15/1/2026). Dia menegaskan, Peristiwa Situjuah merupakan bagian dari sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) untuk menyelamatkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Peristiwa Situjuah ini merupakan salah satu bukti tentang peran pejuang Sumatera Barat dalam menyelamatkan kedaulatan NKRI. Peristiwa ini memiliki makna yang mendalam, bukan sekadar mengenang aksi heroik semata," tegasnya.

Dia memaparkan, melalui Peristiwa Situjuah banyak pelajaran yang bisa diambil dan hikmah yang bisa dipetik. Bahwa, perjuangan membutuhkan kekompakan dan persatuan, juga mengajarkan untuk selalu mewaspadaai Tindakan pengkhianatan.

"Meletusnya Peristiwa Situjuah berawal dari pengkhianatan, akibatnya ratusan pejuang gugur dalam peristiwa itu. Ini mengajarkan kita bahwa keberhasilan hanya bisa dicapai dengan kebersamaan dan menjaga persatuan sementara pengkhianatan

adalah Tindakan hina yang harus diwaspadai," katanya.

Dia berharap, nilai-nilai dan pelajaran berharga yang diperoleh dari Peristiwa Situjuah dapat menjadi pemacu semangat perjuangan demi kemajuan bangsa. Selain itu juga diharapkan semakin memperkuat rasa nasionalisme, persatuan, dan kesatuan NKRI.

Lebih jauh Evi Yandri memaparkan, Peristiwa Situjuah merupakan pilar sejarah yang tidak terpisahkan dari keberadaan PDRI yang menjadi penyelamat kedaulatan NKRI di era perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Hal itu membuktikan bahwa peran tokoh-tokoh Sumatera Barat sangat penting mengambil keputusan strategis di saat-saat genting melawan agresi militer Belanda. F

Tindak Lanjut Aspirasi Warga

Doni Harsiva Yandra Tinjau Jalan Lingkungan di Taratak Tengah Lumpo



Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Doni Harsiva Yandra menjanjikan akan memperjuangkan pembangunan jalan lingkungan untuk warga di Nagari Taratak Tengah Lumpo, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

Hal itu disampaikan Doni Harsiva saat mengunjungi nagari tersebut, Sabtu (21/2/2026). Permintaan pembangunan jalan lingkungan tersebut mencuat melalui aspirasi yang disampaikan melalui pemerintah nagari setempat.

"Kami hadir langsung

sebagai tindak lanjut dari aspirasi warga yang disampaikan melalui pemerintah nagari terkait permintaan pembangunan jalan lingkungan di daerah ini," kata Doni didampingi Wali Nagari Taratak Tengah Lumpo Deweel Colivetra.

Dia menjelaskan, jalan lingkungan tersebut sudah sering dikeluhkan oleh warga karena sudah mengalami kerusakan. Jalan lingkungan merupakan akses penting bagi perekonomian masyarakat maupun mobilitas untuk aktivitas sehari-hari.

"Aspirasi ini akan kami tindaklanjuti sesuai mekanisme

dan kewenangan yang dimiliki dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan daerah," lanjutnya.

Wali Nagari Taratak Tengah Lumpo Deweel Colivetra menyampaikan, jalan lingkungan yang membutuhkan peningkatan adalah epanjang lebih kurang 250 meter. Saat ini mengalami kerusakan cukup berat dan sering terendam banjir jika turun hujan meskipun dengan intensitas rendah.

"Kami berharap peningkatan badan jalan ini dapat terealisasi secepatnya karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat," katanya. P

Ali Muda Tampung Aspirasi Masyarakat Rao Selatan



Masyarakat Jorong IX Abam Nagari Lubuk Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman mengeluhkan harga komoditas karet yang masih rendah dan tidak stabil. Kondisi itu membuat perekonomian menjadi sulit karena sebagian besar masyarakat menggantungkan penghasilan dari perkebunan karet.

Keluhan itu disampaikan warga saat kunjungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Ali Muda ke jorong tersebut, Selasa (3/2/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mengisi masa istirahat bersidang (reses) masa persidangan kedua tahun 2025/2026 yang dilaksanakan mulai tanggal 2 sampai 9 Februari 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Jorong IX Abam, Zulfahmi, para ninik mamak Jorong IX Abam, serta ratusan masyarakat yang antusias menyampaikan berbagai persoalan dan harapan kepada Ali Muda sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat.

Selain keluhan mengenai harga komoditas karet, dalam pertemuan tersebut juga disampaikan permohonan bantuan bak sampah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ada juga aspirasi mengenai pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan drainase untuk peningkatan akses mobilitas masyarakat.

Ali Muda menanggapi aspirasi tersebut menegaskan

bahwa harapan yang disampaikan masyarakat akan ditampung dan dibawa ke tingkat lembaga untuk diperjuangkan masuk ke dalam program pembangunan daerah melalui APBD provinsi.

"Perjuangan terhadap aspirasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab anggota DPRD sebagai wakil rakyat untuk daerah pemilihan," tegasnya.

Dia menambahkan, masa reses merupakan kesempatan bagi anggota DPRD untuk bertatap muka dengan masyarakat di daerah pemilihan yang sekaligus dimanfaatkan untuk menjemput aspirasi. Seluruh harapan masyarakat yang mengemuka dalam pertemuan akan diperjuangkan sesuai mekanisme dan kewenangan yang dimiliki. P

Endarmy Bantu Penerangan Jalan di Desa Pungguang Ladiang Kota Pariaman



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Endarmy menyisihkan tunjangan resesnya untuk membantu masyarakat. Dalam kunjungan ke Desa Pungguang Ladiang Kota Pariaman, Rabu (4/2/2026), politisi Nasdem daerah pemilihan Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman itu menyalurkan tunjangan tersebut untuk membantu menyediakan lampu penerang jalan.

Endarmy tergerak untuk membantu fasilitas lampu penerangan jalan tersebut mengingat beberapa hari lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Masyarakat akan menunaikan ibadah salat tarawih ke masjid dan musala yang tentunya membutuhkan penerangan jalan.

"Karena sebentar lagi masuk

bulan Ramadan, maka kebutuhan lampu penerangan akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang akan melewati jalan menuju masjid dan musala. Bantuan ini sesuai dengan harapan masyarakat, merupakan dana pribadi dari tunjangan reses yang disisihkan," kata Endarmy.

Dia menambahkan, tunjangan resesnya disisihkan secara rutin untuk dialokasikan dalam bentuk bantuan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam kunjungan reses yang dilaksanakan Rabu (4/2) di desa tersebut, masyarakat meminta bantuan berupa lampu penerangan jalan sehingga langsung direalisasikan dua hari setelah kunjungan.

Pemasangan tujuh unit lampu penerangan jalan di Desa Pungguang Kasiak tersebut disaksikan langsung

oleh Endarmy didampingi kepala desa, Aulia Mardhi Arif. Masyarakat menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan karena sangat bermanfaat terutama pada malam hari bulan Ramadan.

Kepala Desa Pungguang Ladiang, Aulia Mardhi Arif mengatakan, Desa Pungguang Ladiang terletak di pinggiran kota dengan kondisi minim penerangan jalan. Bantuan tersebut dirasakan sangat bermanfaat terutama pada saat bulan Ramadan menerangi aktivitas masyarakat di malam hari menuju masjid dan musala. Dia menyampaikan terima kasih kepada Anggota DPRD Sumatera Barat Endarmy dan mengajak masyarakat untuk menjaga penerangan jalan tersebut sehingga dapat dimanfaatkan dalam Waktu lama. P

Albert Hendra Lukman:

Pemerintah Daerah Harus Mampu Ciptakan Iklim Ramah Investasi

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Albert Hendra Lukman menekankan, untuk mendorong percepatan pembangunan daerah harus berusaha menggaet masuknya investasi. Untuk itu, harus diupayakan agar tercipta iklim yang ramah terhadap investasi sehingga pemodal dan pelaku usaha merasa aman untuk melakukan kegiatan usahanya.

Hal itu disampaikan Albert Hendra Lukman saat melakukan kunjungan masa istirahat bersidang (reses) masa persidangan kedua tahun 2025/2026 di Kantor DPC PDIP Kota Padang, Minggu (8/2/2026).

Albert menyampaikan, persoalan ekonomi masih menjadi isu Utama yang mencuat selama kunjungan resesnya ke masyarakat di daerah pemilihan yaitu Kota Padang. Keterbatasan lapangan kerja, tingginya tingkat pengangguran, harga kebutuhan pokok yang fluktuatif, hingga kendala permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di mana semua kondisi itu memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Dalam kondisi ini, kita butuh investasi. Pemerintah harus mampu menciptakan iklim investasi yang ramah agar investor masuk ke Sumatera Barat sehingga terbuka lapangan kerja, roda ekonomi bergerak, dan mendatangkan pendapatan bagi daerah," kata Albert.

Dia menerangkan, belanja



pemerintah masih menjadi penggerak utama perekonomian Sumatera Barat. Sementara, saat ini terjadi kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat yang berdampak kepada berkurangnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah sehingga belanja pemerintah pun menjadi berkurang.

"Akibatnya, pergerakan ekonomi menjadi terganggu, karena belanja pemerintah menjadi berkurang disebabkan berlakunya kebijakan efisiensi anggaran tersebut," ujarnya.

Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Albert menilai Sumatera Barat harus mendorong masuknya belanja swasta melalui peningkatan investasi. Pemerintah daerah harus membuka ruang seluas-luasnya bagi investor untuk menanamkan modal, sehingga menumbuhkan lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja dan mendorong pergerakan ekonomi.

Dia menilai, selama ini Sumatera Barat belum ramah investasi karena berbagai faktor. Persoalan lahan menjadi salah satu faktor yang memberikan

pengaruh besar, termasuk juga persoalan di tingkat birokrasi seperti pengurusan izin dan sebagainya.

"Investor membutuhkan kepastian dan kenyamanan, ini kuncinya ada di pemerintah daerah. Bagaimana memberikan jaminan kelancaran dalam rantai birokrasi perizinan, juga menjembatani penyelesaian persoalan lahan dengan masyarakat pemilik lahan, dan lainnya," lanjutnya.

Dalam kunjungan reses tersebut, Albert juga menghimpun berbagai aspirasi masyarakat Kota Padang yang menjadi basis pemilihannya. Antara lain bantuan perbaikan jembatan yang rusak akibat bencana banjir, pembangunan jalan usaha tani, bantuan fasilitas penunjang pekerja sosial, bantuan untuk pelaku UMKM, dan sebagainya.

Albert berjanji akan memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat tersebut sesuai mekanisme dan kewenangan yang dimiliki untuk masuk ke dalam program pembangunan daerah. P



DPRD Sumbar Siap Geser Anggaran

Pemerintah Daerah Harus Tetapkan Prioritas Pemulihan Pascabencana

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyatakan siap melakukan pembahasan dalam rangka melakukan pergeseran anggaran untuk mempercepat pemulihan pascabencana. Pemerintah daerah diminta menetapkan skala prioritas agar penanganan dapat berjalan maksimal.

Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi dalam diskusi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Senin (5/1/2026) malam. Diskusi tersebut membahas hal berkaitan dengan perencanaan pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Kami mendorong pemerintah daerah menetapkan pendataan, harus menetapkan skala prioritas penanganan dimulai dari kebutuhan yang betul-betul mendesak," kata Muhidi.

Dia menegaskan, terkait pembangunan hunian sementara dan hunian tetap harus direncanakan secara matang. Lahan yang akan digunakan untuk lokasi pembangunan harus aman dan tidak dalam zona rawan bencana.

"Lokasinya juga harus mempertimbangkan akses mobilitas agar tidak menyulitkan masyarakat yang direlokasi," ujarnya.

Pemulihan pascabencana, lanjutnya, juga harus

memperhatikan aspek ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana. Dia menyarankan agar korban terdampak yang membutuhkan pekerjaan dilibatkan dalam proses pembangunan hunian sehingga bisa mendapatkan penghasilan di tengah keterpurukan akibat bencana.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak terutama unsur Forkopimda yang telah berkontribusi besar dalam penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi. Dia menegaskan, akan berupaya secara maksimal dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mempercepat proses pemulihan. P

DPRD Sumbar Tegaskan Komitmen Dukung Peningkatan Kualitas Pendidikan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmen untuk terus mendukung peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan. Evaluasi terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan di sektor pendidikan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan dan perbaikan demi tercapainya tujuan peningkatan kualitas pendidikan.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman menegaskan hal itu, saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Pemeriksaan Kepatuhan Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Menengah Tahun 2024-Triwulan III Tahun 2025, di Kantor Perwakilan BPK Sumatera Barat, Senin (19/1/2026).

Evi Yandri menyampaikan apresiasi kepada BPK atas pemeriksaan yang dilakukan secara profesional, independent, dan objektif terhadap Kepatuhan Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Menengah Tahun 2024-Triwulan III Tahun 2025 di Provinsi Sumatera Barat. Dia berharap LHP tersebut dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan program kegiatan di sektor pendidikan ke depan.



"Pemeriksaan ini sebagai bentuk evaluasi terhadap berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk memastikan anggaran yang disediakan telah dipergunakan sesuai peraturan perundang-undangan demi peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik lagi," kata Evi Yandri.

Dia menegaskan, sarana prasarana infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu dalam meningkatkan kualitas pendidikan, di samping ketersediaan tenaga pendidik yang berkompeten. Dengan tersedianya sarana prasarana yang lengkap, suasana proses pembelajaran akan semakin kondusif sehingga semangat belajar pun akan meningkat.

Pemeriksaan BPK, lanjutnya, merupakan salah satu upaya mengawal alokasi

anggaran yang disediakan untuk sektor pendidikan tersebut termaksimalkan secara maksimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemeriksaan juga sebagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan anggaran.

Sesuai tugas dan fungsi DPRD di bidang pengawasan, Evi Yandri menegaskan akan memedomani rekomendasi dan catatan di dalam LHP BPK tersebut untuk mengawasi tindak lanjut rekomendasi BPK oleh pemerintah daerah. Dia mengingatkan pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang disampaikan di dalam LHP sesuai dengan batas Waktu yang ditentukan.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi

saat menerima dokumen LHP tersebut menegaskan, Pemprov akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara sungguh-sungguh, tepat waktu, dan bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia mengatakan LHP yang diserahkan tersebut merupakan instrumen evaluasi yang sangat berharga. LHP bukan hanya untuk menilai tingkat kepatuhan, tetapi juga sebagai bahan perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan pendidikan ke depan.

"Kami juga mendorong

seluruh perangkat daerah terkait untuk memperkuat koordinasi, pengendalian internal, serta meningkatkan kualitas administrasi dan pelaksanaan kegiatan," tegasnya.

Kepala BPK perwakilan Sumatera Barat Sudarminto Eko Putra saat penyerahan LHP tersebut mengatakan, tujuan pemeriksaan adalah untuk memberi kesimpulan atas kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah Tahun 2024-Triwulan III 2025 kepada Pemprov Sumatera Barat.

Beberapa hal yang mesti menjadi perhatian oleh

pemerintah provinsi menurut Sudarminto antara lain pemuktahiran data sarpras, pembandingan harga/kualitas barang/jasa, terkait pengerjaan bangunan dan gedung serta pembayaran biaya jasa. Dia berharap hasil pemeriksaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sehingga anggaran yang tersedia dapat memberikan dampak maksimal untuk percepatan pembangunan. P

Ketua DPRD Sumbar Minta MBG Ikut Perkuat Ekonomi Masyarakat



Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut memperkuat perekonomian masyarakat. Program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata tidak hanya untuk pemenuhan gizi pelajar tetapi juga berkontribusi untuk

pengembangan UMKM.

Hal itu disampaikan Muhidi saat menghadiri peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan SBLF Jati, Kecamatan Padang Timur Kota Padang, Minggu (4/1/2026). Menurutnya, program MBG hendaknya menjadi salah satu solusi dalam menekan angka pengangguran serta mempercepat

pengentasan kemiskinan.

"MBG hendaknya jangan hanya soal pemenuhan gizi tetapi juga harus memberikan dampak nyata dengan berkontribusi untuk memperkuat perekonomian masyarakat," kata Muhidi.

Muhidi menegaskan akan mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan secara maksimal, tepat sasaran, dan transparan. Dia meminta, pekerja yang terlibat dalam pelaksanaan MBG hendaknya mendahulukan warga di sekitar lokasi.

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Muslim M Yatim dalam kesempatan itu mengharapkan pelaksanaan program MBG dapat berjalan lancar. Dia berharap, dengan pelaksanaan program MBG yang konsisten dan berkualitas, cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan. P

Ketua DPRD Sumbar Minta Percepat Pendataan Untuk Pemulihan Pascabencana



Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi mengingatkan pemerintah bahwa proses pemulihan pascabencana dihadapkan kepada kondisi anomali cuaca. Untuk itu proses pendataan harus dipercepat agar pemulihan dapat segera dilaksanakan.

Hal itu ditegaskan Muhidi, Rabu (7/1/2026). Menurutnya, hal itu telah disampaikan dalam rapat koordinasi pemulihan pascabencana bersama gubernur dan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda).

"Ini sudah disampaikan dalam rapat percepatan penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bersama gubernur dan Forkopimda, bahwa kita

meminta mempercepat proses pendataan karena kondisi saat ini masih dihadapkan kepada siklus cuaca," kata Muhidi.

Dia menyebutkan, saran tersebut disampaikan setelah mempertimbangkan masukan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam rapat tersebut. BMKG menyampaikan prediksi bahwa pada Januari hingga Februari masih akan terjadi hujan meskipun dalam intensitas ringan hingga sedang.

"Ini harus tetap diwaspadai karena masih berpotensi ancaman bencana, jadi kita berpacu dengan Waktu," ujarnya.

Sementara itu, lanjutnya, masih berdasarkan paparan BMKG, pada periode Maret hingga April diprediksi intensitas hujan lebih tinggi meskipun

tidak separah siklon tropis. Kemudian pada Mei hingga September cuaca diperkirakan akan cenderung panas, Oktober hingga Desember diperkirakan Kembali memasuki musim hujan.

Dia meminta agar pendataan dilakukan secara akurat karena pekerjaan fisik, termasuk pemulihan sarana publik sangat bergantung kepada siklus cuaca. Pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi menurut Muhidi harus terintegrasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat.

"Skema pemulihan harus mencakup pemetaan kemampuan keuangan daerah serta potensi dukungan dari berbagai pihak, termasuk donatur, guna mempercepat pemulihan pascabencana," tegasnya. P



Harmonisasi Produk Hukum Daerah

Bapemperda DPRD Sumbar Rapat dengan Kanwil Kemenkum HAM

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi terkait harmonisasi rancangan peraturan daerah (Ranperda) terutama ranperda yang menjadi usul Prakarsa atau inisiatif DPRD.

Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat M. Yasin menjelaskan, rapat tersebut dilakukan sebagai upaya optimalisasi kinerja Bapemperda dalam memastikan setiap rancangan peraturan daerah sudah sesuai dengan kebutuhan daerah sekaligus tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

"Rapat ini bertujuan untuk harmonisasi ranperda dan memastikan setiap ranperda inisiatif DPRD selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sistem hukum nasional, serta

kebutuhan masyarakat," kata Yasin, Rabu (25/2/2026).

Dia menambahkan, melalui proses harmonisasi, pembulatan dan pemantapan, ranperda yang disusun diharapkan memiliki landasan hukum yang kuat, implementatif, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara komprehensif. Hal tersebut sekaligus sebagai upaya menghadirkan produk hukum daerah yang berkualitas, akuntabel dan berpihak pada masyarakat.

"Kedudukan perda adalah sebagai dasar dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga rumusannya harus disusun secara cermat, sesuai kebutuhan masyarakat, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Yasin menerangkan, tahun 2026 direncanakan pembahasan terhadap sebanyak 11 ranperda di dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda).

Rinciannya, empat ranperda merupakan usulan baru, tiga ranperda kumulatif, dan empat ranperda lainnya merupakan luncuran dari tahun 2025.

Lebih jauh Yasin mengungkapkan bahwa Bapemperda juga terus melakukan kajian terhadap berbagai perda yang sudah diterbitkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi produk hukum daerah. Melalui tim ahli, kajian tersebut dilakukan secara teliti sehingga nantinya akan ditemukan apakah perda tersebut masih diperlukan, atau masih relevan, atau perlu direvisi, atau bahkan sudah tidak sesuai lagi dengan regulasi dan kondisi saat ini.

"Jadi dari kajian tersebut bisa diketahui dan diinventarisir masalah dari seluruh perda, apakah masih dibutuhkan, perlu direvisi, atau digabung dengan perda lain yang relevan sehingga produk hukum daerah bisa aplikatif dan implementatif sesuai kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah," ujarnya. T

DPRD Sumbar Pantau Kesiapan Terminal Sago Jelang Arus Mudik Lebaran



Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Doni Harsiva Yandra mengunjungi Terminal Sago, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Jumat (20/2/026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan sarana dan prasarana transportasi menjelang arus mudik lebaran 1447 H.

Doni menjelaskan, kunjungan itu dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal, khususnya dalam menghadapi lonjakan penumpang yang diprediksi meningkat signifikan pada H-7 hingga H+7 Lebaran.

"Kami ingin memastikan Terminal Sago benar-benar siap menyambut arus mudik Lebaran. Keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang harus

menjadi prioritas utama," kata Doni.

Dia meminta, koordinasi antara pengelola terminal perlu diperkuat untuk mengantisipasi kepadatan penumpang dan potensi gangguan selama masa mudik. Disamping itu, dia juga mengharapkan agar segera menuntaskan kejelasan sertifikat lahan Terminal Sago untuk memastikan status kepemilikan aset antara Pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Menurutnya, ketidakjelasan status aset tersebut berpotensi menghambat pengelolaan, pengembangan, serta penganggaran fasilitas terminal ke depan.

"Kami meminta agar persoalan sertifikasi ini segera diselesaikan. Harus jelas mana yang menjadi aset Pemkab dan

mana yang menjadi aset Provinsi, supaya tidak menimbulkan persoalan administrasi nantinya," katanya.

Kepala UPT Terminal Sago, Doni Hendra dalam kesempatan itu menjelaskan, penyelesaian permasalahan sertifikat lahan terminal seluas lebih kurang 1 hektare itu sedang dalam proses.

Mengadapi lonjakan arus angkutan selama musim mudik lebaran, pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan. Termasuk penambahan petugas di lapangan, pengaturan arus keluar masuk kendaraan, serta peningkatan kebersihan dan fasilitas umum.

"Kami juga telah melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Perhubungan dan pihak kepolisian. Kami berkomitmen untuk menciptakan suasana arus mudik yang aman, nyaman, dan tertib," ujarnya. P

DPRD Sumbar Minta Perda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren Terlaksana Optimal



Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mendorong agar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2025 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dapat berjalan secara optimal. Perda tersebut merupakan usul prakarsa DPRD sebagai bentuk perhatian terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pondok pesantren.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat Lazuardi Erman dalam rapat bersama mitra kerja terkait, Rabu (18/2/2025) menegaskan, rapat tersebut sebagai langkah tindak lanjut yang bertujuan untuk memastikan perda yang diterbitkan akan diimplementasikan secara optimal dan terarah untuk memberikan manfaat bagi penguatan pesantren di Sumatera Barat.

Lazuardi menjelaskan, sistem pendidikan pondok pesantren merupakan evolusi dari pendidikan tradisional Sumatera Barat yaitu pendidikan di surau dan madrasah. Pola pendidikan yang dikembangkan meliputi ilmu agama, pendidikan umum, dan pengembangan karakter yang sesuai dengan ajaran Islam.

Meski demikian, perkembangan lembaga pendidikan pondok pesantren di Sumatera Barat masih dihadapkan kepada tantangan berat seperti ketersediaan sarana prasarana, ditambah lagi dinamika ekonomi dan sosial yang terus berubah. Untuk itu, lanjutnya, pondok pesantren

membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah agar kendala atau tantangan tersebut bisa diatasi.

"Oleh karena itulah perlu kerja sama antara pesantren, pemerintah dalam mengembangkan pendidikan dan pembinaan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan zaman," tegasnya.

Menurutnya, Perda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren yang ditetapkan pada Desember 2025 lalu tersebut merupakan wujud dari peningkatan peran pemerintah dalam mengatasi kendala yang dihadapi pondok pesantren di Sumatera Barat.

"Sedikitnya ada enam tujuan utama yang menjadi dasar bagi lahirnya Perda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, sehingga perda ini diinisiasi oleh DPRD Sumatera Barat melalui Komisi V untuk mendorong pesantren mampu menjawab tantangan tersebut," ujarnya.

Dia menjelaskan, tujuan tersebut antara lain memfasilitasi tersusunnya data pondok pesantren yang berada di wilayah Sumatera Barat. Selain itu juga termasuk memfasilitasi tersusunnya kebijakan terkait pondok pesantren untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, tata Kelola, dan peningkat kualitas SDM pesantren.

Tujuan lainnya, menaungi tersusunnya program fasilitas, pemberdayaan dan pengembangan pondok pesantren dalam satu kesatuan rencana kerja pemerintah daerah. Kemudian menyinergikan program fasilitas, pemberdayaan dan

pengembangan pondok pesantren dalam satuan rencana kerja pemerintah daerah yang bersumber dari pusat maupun pemerintah daerah kabupaten/kota.

Lazuardi menambahkan, perda tersebut juga bertujuan untuk menampung peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan terhadap pondok pesantren. Selain itu juga menumbuhkan komitmen bersama untuk menjadikan pondok pesantren sebagai lembaga peningkatan kualitas sumber daya manusia," kata Lazuardi.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhammad Iqra Chissa Putra menegaskan, penyelenggaraan pesantren merupakan salah satu bentuk pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Pesantren tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta

membentuk akhlak mulia generasi muda.

"Ini sejalan dengan amanat konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ujar Nanda.

Ia mengatakan, pesantren memiliki fungsi yang sangat strategis, yaitu fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga fungsi tersebut berjalan secara terpadu, membentuk ekosistem sosial yang berakar pada nilai-nilai keagamaan, tradisi, serta kearifan lokal masyarakat.

"Mengingat itulah, keberadaan pesantren harus mendapatkan rekognisi dan afirmasi dari negara, termasuk pemerintah daerah," ujarnya.

Dalam konteks ini, lanjut Iqra, pemerintah daerah memiliki peran penting untuk memberikan dukungan nyata dalam bentuk fasilitasi, baik berupa kebijakan, pendanaan, infrastruktur, maupun pemberdayaan secara berkelanjutan. Untuk itulah dukungan itu kemudian dibuat payung hukumnya berupa perda. T

Program 400 Sambungan Listrik untuk Warga Kurang Mampu di Pessel dan Mentawai



Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Doni Harsiva Yandra menargetkan pemasangan sambungan listrik sebanyak 400 unit rumah bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai di tahun 2026 melalui APBD Sumatera Barat.

Hal itu dikatakan Doni Harsiva Yandra saat melakukan

kunjungan meninjau pelaksanaan pemasangan listrik bagi masyarakat yang tidak mampu di Kenagarian Aur Begalung Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, Pada (Kamis 19/2/2026).

"Di tahun 2025 yang sudah terpasang sebanyak 87 unit. Sedangkan tahun 2026 ini ditargetkan terpasang 400 unit rumah," ujar Doni Harsiva Yandra.

Doni mengungkapkan, program pemasangan listrik bagi warga kurang mampu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan, khususnya di sektor energi. Akses listrik yang memadai menjadi kebutuhan dasar masyarakat dalam mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Program tersebut, jelas Doni, difokuskan pada rumah tangga berpenghasilan rendah

yang selama ini belum memiliki sambungan listrik mandiri. Untuk itu harus dipastikan bahwa bantuan pemasangan listrik ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

"Jangan sampai ada warga kurang mampu yang belum terdata atau justru ada penerima yang tidak sesuai kriteria," ujarnya.

Sementara itu, salah satu penerima bantuan, Diah (35) warga Lubuk Aur mengungkapkan rasa syukur atas bantuan pemasangan listrik yang diterimanya. Selama ini, dirinya bersama anak-anaknya hanya menumpang aliran listrik dari rumah tetangga.

"Sekarang sudah tidak menumpang lagi. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Doni yang sudah memperjalkan bantuan ini karena sangat berarti sekali bagi saya," ungkapnyanya. P

Komisi I DPRD Sumbar "Bedah" Kinerja Anggaran OPD Mitra di Tahun 2025



Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat "membedah" kinerja anggaran Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) mitra kerja di tahun 2025. Kegiatan dalam upaya evaluasi itu dilakukan untuk meningkatkan akurasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga dana yang dialokasikan bisa terserap maksimal dengan hasil yang baik sesuai target pembangunan daerah.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat Sawal dalam rapat evaluasi bersama OPD mitra kerja, Rabu (7/1/2026) menyampaikan, rapat evaluasi membedah secara menyeluruh capaian dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana dan kegiatan OPD

sepanjang tahun 2025. Dari evaluasi tersebut, diharapkan mendapat gambaran bagaimana merencanakan anggaran dan kegiatan secara tepat sasaran dan cara mengatasi kendala yang dihadapi ke depan.

"Evaluasi ini harus dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan dan anggaran yang direncanakan telah berjalan secara tepat sasaran sesuai target pembangunan. Selain itu juga untuk menyimpulkan berbagai kendala yang dihadapi untuk merumuskan langkah-langkah penanganan ke depan sehingga akurasi anggaran dan kegiatan dapat ditingkatkan secara maksimal," tegas Sawal.

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi I DPRD Sumatera Barat Irsyad Syafar

menyampaikan, secara umum kinerja OPD mitra kerja Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum, dan antarlembaga tersebut menunjukkan hasil cukup baik. Sebagian besar program kegiatan yang direncanakan bisa dituntaskan dengan capaian di atas 90 persen.

"Meski demikian, masih ada beberapa catatan yang harus menjadi perhatian seperti adanya kegiatan yang tercapai 100 persen namun serapan anggaran tidak maksimal, dan sebagainya," kata Irsyad.

Menurutnya, dari satu sisi, kondisi itu bisa diartikan sebagai bentuk efisiensi namun di sisi lain juga menggambarkan perencanaan anggaran yang tidak akurat sehingga menjadi

sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA). Padahal, jika dilakukan akurasi anggaran, hal itu tidak akan terjadi dan kelebihan anggaran harusnya bisa dialokasikan untuk kegiatan lain.

"Ke depan hendaknya kondisi ini tidak terjadi lagi, perencanaan anggaran harus lebih akurat

sehingga bisa dialokasikan untuk kegiatan lain," tegasnya.

Komisi I DPRD Sumatera Barat berharap hasil evaluasi tersebut dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan program dan anggaran tahun 2026, sehingga kinerja pemerintahan daerah semakin

efektif, efisien, dan tepat sasaran. Secara menyeluruh, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2025 akan dilakukan setelah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI) pada bulan ketiga atau keempat tahun 2026 mendatang. T

Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

DPRD Sumbar Minta Program Pembangunan Berdampak Positif Terhadap Ekonomi

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera

Barat meminta pemerintah daerah lebih memfokuskan program dan kegiatan yang memberikan dampak nyata kepada perekonomian. Pembangunan daerah harus memberikan kontribusi lebih besar lagi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu ditegaskan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Khairuddin Simanjuntak dalam rapat evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2025 bersama Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) mitra kerja, Rabu (7/1/2026).

"Evaluasi ini sebagai bentuk pengawasan DPRD terhadap program dan kegiatan pemerintah daerah, untuk melihat sejauh mana pembangunan telah memberikan kontribusi nyata terhadap ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Dia mengingatkan, kendala yang terjadi pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 menjadi perhatian OPD masing-masing, untuk



kemudian diperbaiki. Tahun 2026 pemerintah daerah akan dihadapi sejumlah tantangan yang akan berimbas kepada kesejahteraan masyarakat.

"Dengan demikian, tantangan ini harus diantisipasi dengan mempersiapkan langkah-langkah nyata dalam memfokuskan perhatian kepada peningkatan perekonomian agar kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan," ujarnya.

Dia menegaskan, DPRD akan memberikan dukungan penuh terhadap program pembangunan yang memberikan dampak positif kepada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu pemerintah daerah melalui OPD harus terus memperkuat koordinasi dan lebih serius meningkatkan kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah. P



DPRD Sumbar Minta Pemerintah Daerah Pacu Kinerja BUMD



Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera

Barat meminta pemerintah daerah untuk memacu kinerja pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan daerah.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Mochklaslin dalam rapat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah bersama OPD mitra kerja, Rabu (7/1/2026).

"Pemerintah daerah membutuhkan anggaran untuk membiayai program pembangunan, salah satu sumbernya dari pendapatan asli

daerah. Untuk itu BUMD yang ada harus dipacu kinerjanya dalam memberikan kontribusi melalui perolehan dividen untuk menghasilkan PAD yang optimal lagi," kata Mochklaslin.

Dia mengingatkan, kinerja BUMD milik Pemprov Sumatera Barat selama ini masih belum optimal. Ke depan, pengelolaan BUMD harus lebih ditingkatkan agar dividen yang diperoleh juga bisa dipacu.

"Sumber pendapatan daerah itu salah satunya adalah dari PAD, termasuk dari dividen BUMD. Ini harus ditingkatkan lagi pengelolaannya agar hasilnya juga bisa lebih baik untuk membiayai program pembangunan daerah," tegasnya.

Komisi III DPRD Sumatera Barat meminta agar ke depan tata Kelola BUMD harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dengan kondisi keuangan daerah saat ini, PAD harus lebih dipacu, termasuk dari BUMD agar pembangunan yang diharapkan masyarakat bisa diwujudkan.

"Hasil evaluasi yang dilakukan hari ini hendaknya dapat diperhatikan dan dijadikan sebagai acuan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan sehingga ke depan kinerja seluruh OPD dan BUMD dapat lebih maksimal lagi untuk mendorong percepatan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat," tutupnya. P

DPRD Sumbar Kawal Pemulihan Bencana Banjir Bandang



Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meminta pemerintah untuk melakukan penanganan pascabencana secara serius dan terencana. DPRD akan mengawal aksi pemulihan agar bisa terlaksana dengan cepat sehingga aktivitas masyarakat kembali normal.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Doni Harsiva Yandra dalam rapat bersama OPD mitra kerja, Rabu (7/1/2026) menegaskan, pemulihan infrastruktur harus menjadi perhatian Utama karena menyangkut kepentingan masyarakat. Di samping

itu, upaya rekonstruksi dan rehabilitasi pemukiman juga harus dipercepat.

"Kerusakan infrastruktur akibat bencana hidrometeorologi pada akhir tahun lalu cukup parah, begitu juga kerusakan permukiman dan lahan pertanian masyarakat. Ini harus menjadi perhatian agar pemulihan bisa dipercepat," tegas Doni.

Dia menambahkan, kerusakan jalan, jembatan, jaringan irigasi, dan lainnya harus segera diperbaiki. Alokasi anggaran untuk pemulihan harus terencana dan tepat sasaran.

"DPRD akan mengawal pemulihan ini agar benar-benar terlaksana dengan baik,

terencana, dan tepat sasaran," tambahnya.

Dia meminta OPD terkait untuk melakukan pendataan secara teliti, merencanakan anggaran secara tepat, dan melaksanakan kegiatan pemulihan secara cepat. Infrastruktur jalan, jembatan, dan jaringan irigasi harus prioritas karena menyangkut akses aktivitas perekonomian masyarakat.

"Agar pemulihan berjalan baik, harus dilakukan dengan koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota maupun dengan pemerintah pusat," tutupnya. P



Evi Yandri Serap Aspirasi di Koto Lalang, Mayoritas Warga Hidup dari Bertani

Sebagian besar masyarakat Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang hidup dari sector pertanian. Sebagian kecil lainnya hidup dari berdagang dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Hal itu diungkapkan Ketua Forum Nagari Koto Lalang, Maulana saat menerima kunjungan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman ke daerah itu, Senin (2/2/2026). Maulana menyebutkan, kunjungan Evi Yandri tersebut merupakan yang pertama kali ke kelurahan itu.

"Kunjungan Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat ini merupakan yang pertama kalinya ke daerah kami. Warga di sini Sebagian besar hidup dari Bertani, sebagian lainnya menjadi pedagang dan pelaku UMKM," terang Maulana.

Dalam kunjungan Evi Yandri memanfaatkan masa istirahat bersidang masa persidangan kedua tahun 2025-2026 tersebut, Maulana menyampaikan beberapa aspirasi warga. Antara lain untuk sector pertanian, peternakan, infrastruktur, dan bantuan untuk pedagang dan bantuan untuk pelaku UMKM.

Untuk sektor pertanian, antara lain persoalan irigasi yang rusak. Kemudian, sumber air dari Lubuk Tengah belum optimal mengairi lahan masyarakat

karena belum dibeton.

Sedangkan, untuk mendapatkan tambahan penghasilan, warga menambah usaha dengan beternak. Untuk mendukung usaha tersebut, warga meminta bantuan pakan ternak. Karang taruna setempat juga meminta bantuan ternak bebek, di mana usaha tersebut merupakan program kepemudaan untuk mengisi Waktu dengan kegiatan positif yang menghasilkan.

Sementara itu, usaha yang digeluti pelaku UMKM sulit berkembang karena keterbatasan modal dan keterampilan. Usaha yang dijalankan pelaku UMKM di kelurahan tersebut antara lain kerajinan perabotan rotan dan usaha pembuatan keripik.

Selain itu, anggota Lembaga Pengelola Sampah (LPS) setempat juga meminta bantuan becak motor untuk mengangkut sampah. Dari lima LPS, saat ini hanya memiliki satu unit becak motor pengangkut sampah. Aspirasi lainnya yang disampaikan kepada Evi Yandri adalah bantuan pembangunan jalan, bantuan untuk masjid, pengadaan Alquran an sebagainya.

Menyambut aspirasi warga tersebut, Evi Yandri menjelaskan bahwa dalam pengelolaan pembangunan daerah dibagi sesuai kewenangan yang dimiliki. Ada program yang menjadi kewenangan

pemerintah kota/ kabupaten, ada yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan ada pula yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Sebagai anggota DPRD provinsi, bagian yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi akan kami perjuangkan masuk ke dalam program pembangunan pemerintah provinsi sesuai dengan prioritas dan ketersediaan anggaran," jelasnya.

Sementara itu, untuk yang menjadi bagian kewenangan pemerintah kota, pihaknya akan mencoba mengkoordinasikannya secara kelembagaan dan politik kepada DPRD Kota Padang. Demikian juga dengan urusan pembangunan yang menjadi bagian kewenangan pemerintah pusat.

"Jadi kegiatan pembangunan daerah itu sudah ada pembagian kewenangan, namun tidak masalah karena kami akan mencoba melakukan koordinasi secara kelembagaan dan pendekatan politik melalui

perwakilan baik di tingkat kota maupun kepada DPR RI," ujarnya.

Evi Yandri meminta setiap usulan yang disampaikan dapat dilengkapi dengan dokumen tertulis untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan sesuai regulasi. Sedangkan untuk pembangunan jalan dan lainnya yang membutuhkan lahan, diharapkan lahannya sudah tersedia tana ada kendala sehingga pembangunan bisa diusulkan untuk direalisasikan.

Dalam kesempatan itu, Evi Yandri juga memberikan bantuan langsung secara tunai kepada masyarakat dengan dana pribadi. Antara lain Rp1 juta untuk kader Pos Yandu yang mengeluhkan upah, Rp2 juta untuk pembelian Alquran dan Rp1 juta untuk TPA/TPQ. Untuk aspirasi lainnya, dia meminta segera melengkapi dengan dokumen tertulis untuk ditindaklanjuti. P

Iqra Chissa: SMP di Balai Gadang Perlu Ditambah

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Provinsi Sumatera Barat Muhammad Iqra Chissa Putra menilai, jumlah lulusan Sekolah Dasar (SD) di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang semakin meningkat. Banyaknya siswa tersebut dirasakan tidak akan tertampung seluruhnya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada saat ini sehingga perlu ditambah SMP baru.

Hal itu disampaikan Iqra Chissa saat melakukan kunjungan masa istirahat bersidang (reses) masa persidangan kedua DPRD Sumatera Barat tahun 2025-2026, Rabu (4/2/2026). Menurutnya, kekurangan daya tampung SMP tersebut akan berdampak kepada upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Jumlah penduduk di kelurahan ini semakin bertambah, anak-anak usia sekolah juga semakin banyak sehingga sudah



waktunya ditambah SMP agar mampu menampung siswa," kata Iqra menjawab permintaan warga agar SMP di kelurahan tersebut ditambah.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh kepala SD, Kepala SMP, Kepala SMA, Ketua RT, Ketua RW, Lurah, pengurus masjid, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda di Kelurahan Balai Gadang.

Iqra menegaskan, sektor pendidikan adalah salah satu prioritas pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, pembangunan sarana

prasarana sekolah harus menjadi perhatian, sejalan dengan peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik serta fasilitas pendukung pembelajaran.

Permintaan pembangunan Gedung SMP adalah salah satu dari beberapa aspirasi masyarakat yang ditampung Iqra Chissa dalam kesempatan mengunjungi masyarakat di kelurahan itu. Aspirasi lainnya adalah pengaspalan jalan, pembangunan gedung serbaguna, hingga permohonan bantuan peralatan penunjang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan sebagainya. P

Nanda Satria Janjikan Kenaikan Bantuan Modal untuk Pelaku UMKM



Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Nanda Satria berjanji akan memperjuangkan kenaikan bantuan modal usaha untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebelumnya, bantuan modal yang disediakan pemerintah adalah senilai Rp2 juta, akan diperjuangkan untuk bisa dinaikkan menjadi Rp4 juta.

Nanda Satria menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan masyarakat Pasa Lalang Kecamatan Kuranji, Kamis (5/2/2026). Dia menilai, kenaikan nilai bantuan yang diberikan adalah sebagai upaya menjaga kestabilan usaha pelaku UMKM penerima manfaat.

"Bantuan modal usaha selama ini melalui Dinas Koperasi UMKM baru senilai Rp2 juta,

kami akan berupaya untuk bertambah menjadi Rp4 juta agar usaha pelaku UMKM penerima manfaat bisa stabil dengan nilai modal yang lebih besar tersebut," kata Nanda.

Pertemuan dengan masyarakat tersebut dilaksanakan Nanda Satria memanfaatkan masa istirahat bersidang (reses) masa persidangan kedua tahun 2025-2026. Nanda mengatakan, dengan usaha yang stabil maka ekonomi masyarakat bisa bergerak lebih cepat.

Dalam kesempatan itu, Nanda juga mendorong masyarakat untuk membentuk koperasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk bersama membangun usaha yang kuat. Dengan demikian maka kesejahteraan masyarakat bisa semakin meningkat.

Dia menyebutkan, nilai bantuan modal untuk koperasi dari pemerintah sangat besar. Jika masyarakat membentuk koperasi dan bisa meraih bantuan modal tersebut tentunya akan menjadi faktor pendorong ekonomi masyarakat yang sangat kuat.

Dalam pertemuan tersebut, Nanda juga menerima banyak aspirasi dari masyarakat Pasa Lalang. Dia menegaskan, seluruh aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang dimiliki di mana yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi akan diperjuangkan masuk ke dalam program provinsi sementara yang menjadi kewenangan pemerintah kota dan pemerintah pusat akan dikoordinasikan dengan melalui pendekatan politik dan kelembagaan. P

Evi Yandri Tampung Aspirasi Masyarakat Terdampak Bencana di Pauh

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman mengunjungi hunian sementara mandiri di Kapalo Koto Kecamatan Pauh Kota Padang, Jumat (6/2/2026). Kunjungan itu dilakukan memanfaatkan masa istirahat bersidang masa persidangan kedua 2025-2026 untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.

Dalam kesempatan itu, Evi Yandri menampung banyak aspirasi yang sebagian besar berkaitan dengan dampak bencana galodo yang dialami masyarakat. Kecamatan Pauh merupakan salah satu wilayah terparah terdampak bencana galodo terutama di Lambung Bukik, Batu Busuak dan sekitarnya.

"Memanfaatkan masa reses ini kami mengunjungi masyarakat di Kecamatan Pauh yang terdampak sangat parah dalam musibah bencana akhir tahun 2025 lalu," kata Evi Yandri.

Evi Yandri menambahkan, setelah dihantam galodo banjir bandang, kondisi masyarakat mengalami kerugian besar. Selain dari rumah tempat tinggal dan lahan pertanian, juga terjadi kerusakan infrastruktur yang sangat parah.

"Selain dari rumah tempat tinggal dan lahan pertanian, banyak sarana infrastruktur yang mengalami kerusakan parah seperti jaringan irigasi, kerusakan sungai, jalan, dan jembatan serta fasilitas publik lainnya.

Salah satu keluhan yang

an Makanan Tambahan (PMT) Posyandu	Posyandu	Koto Lalang	Sosial	TPB 04	7.000.000	875.000	7.875.000	7	Klimp	1	TJSL PTSP	-
atan Kapasitas Usaha Arang Batok	KU Arang	RW II	Ekonomi	TPB 01	7.000.000	875.000	7.875.000	1	Klimp	1	TJSL PTSP	-
ngunan Rumah Layak Huni bagi Rumah	Forum Nagari	Koto Lalang	Lingkungan	TPB 11	50.000.000	6.250.000	56.250.000	2	KK	1	TJSL PTSP	-
1 HK Petalur bagi Usia Muda Produktif	Karang Taruna	Koto Lalang	Sosial	TPB 4	11.375.000	1.875.000	13.250.000	30	orang	1	TJSL PTSP	-
PADANG ELOK NAGARI					11.375.000	102.375.000	-	-	-	-	-	-
Adat Salingka Nagari Lubuk Kilangan	KAN Luki	Luki	Lingkungan	TPB 16	1.250.000	11.250.000	12.500.000	200	orang	1	TJSL PTSP	-
+ B + C + D					20.000.000	180.000.000	-	-	-	-	-	-

sangat diharapkan untuk segera diperbaiki adalah jembatan untuk akses masyarakat terutama untuk anak-anak ke sekolah. Saat ini terpaksa harus berangkat ke sekolah dengan menyeberangi sungai atau jalan memutar dengan Jarak yang cukup jauh untuk sampai ke sekolah.

Menjawab berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat, Evi Yandri menyampaikan akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan. Pemerintah baik pusat, provinsi maupun Kota Padang telah mendata seluruh kerusakan termasuk rumah penduduk yang rusak dihantam galodo.

"Untuk jembatan yang putus, diusahakan secepatnya dibangun jembatan darurat sampai nanti bisa direalisasikan pembangunan jembatan permanen," ujarnya.

Sedangkan untuk bantuan rumah yang rusak, juga telah dilakukan pendataan dan dikelompokkan berdasarkan kategori, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan hilang atau hanyut terbawa air bah.

Dia meminta kepada

masyarakat, pengurus RT/RW, dan lurah untuk memastikan seluruh korban terdampak bencana sudah tercatat sesuai jenis kerusakan yang dialami. Data tersebut hendaknya dilakukan verifikasi sebaik mungkin sehingga nantinya seluruh korban mendapatkan bantuan sesuai dengan jenis kerusakan yang dialami.

Lebih jauh, Evi Yandri menyampaikan bahwa dalam pembangunan daerah, termasuk penanganan bencana ada pembagian kewenangan antara pemerintah kota, provinsi, dan pemerintah pusat. Hal itu akan tetap berada di bawah koordinasi baik antar pemerintah maupun dengan DPRD.

"Untuk bagian yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kami di DPRD akan memperjuangkan secara maksimal agar terealisasi, dan untuk yang menjadi bagian pemerintah kota dan pemerintah pusat akan dilakukan koordinasi sehingga program perbaikan pascabencana dapat berjalan secara optimal," katanya. P



SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI

1 Syawal 1447 H / 2026 M

“ Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal yaa kariim,
di hari yang penuh kemenangan ini, mari kita sucikan hati,
pererat silaturahmi, dan saling memaafkan. ”

Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin



EVI YANDRI RAJO BUDIMAN, S.IP
WAKIL KETUA DPRD PROV. SUMBAR

DRS. H. MUHIDI, MM
KETUA DPRD PROV. SUMBAR

M. IQRA CHISSA PUTRA, S.ST, MM
WAKIL KETUA DPRD PROV. SUMBAR

NANDA SATRIA, S.IP
WAKIL KETUA DPRD PROV. SUMBAR